

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minyak mentah merupakan salah satu sumber energi utama yang paling banyak digunakan hampir di seluruh negara. Setiap negara akan memerlukan minyak untuk berbagai kegiatan di antaranya adalah konsumsi dan produksi agar dapat menggerakkan perekonomian seperti meningkatnya produktivitas sektor industri dan transportasi. Dari waktu ke waktu kebutuhan minyak semakin meningkat. Efek globalisasi membuat kebutuhan minyak meningkat tajam. Industri-industri baik yang kecil maupun besar mayoritas akan sangat membutuhkan minyak dalam memproduksi barang maupun jasa. (Utama, 2013)

Dalam hal pemenuhan kebutuhan minyak dunia, terdapat negara-negara yang memiliki sumber daya alam berupa minyak yang berlimpah sehingga mampu untuk memasok kebutuhan minyak dunia. Negara-negara tersebut seperti Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Dalam pemenuhan kebutuhan minyak dunia tentunya negara-negara pengekspor minyak memiliki keuntungan yang sangat besar, namun dalam penerapannya terdapat berbagai permasalahan yang terjadi sehingga baik negara pengekspor maupun negara yang mengimpor minyak mengalami berbagai macam permasalahan. Permasalahan yang dapat terjadi seperti tidak terorganisirnya pasokan minyak, harga minyak yang tidak sama dari masing-masing pengekspor, kebutuhan importir yang berbeda-beda dan masih banyak lagi. (Novalia, 2019)

Untuk mengatur permasalahan dalam hal minyak dunia dibentuklah suatu organisasi yang diberi nama *Organization of the Petroleum Exporting Countries* (OPEC). Organisasi ini bertujuan untuk dapat bernegosiasi terkait dengan permasalahan minyak seperti produksi, harga, hak konsensi minyak bumi. OPEC didirikan pada tanggal 14 September 1961 di Bagdad,

Irak dengan 5 pendiri awal yaitu Kuwait, Iran, Irak, Arab Saudi, dan Venezuela. Venezuela adalah negara yang pertama menjadi pencetus pembentukan OPEC dengan melakukan pendekatan ke Iran, Gabon, Libya, Kuwait dan Arab Saudi di tahun 1949. Venezuela memberikan saran terhadap negara-negara tersebut untuk bertukar pandangan dan melakukan eksplorasi jalan lebar serta berkomunikasi yang lebih intens antara negara-negara penghasil minyak. Di tanggal 10-14 September 1960, dari gagasan dari Menteri Perdagangan dan Energi Venezuela Juan Pablo Perez Alfonzo dan Menteri Pertambangan dan Energi Saudi Arabia Abdullah Al Tariki, pemerintahan Irak, Persia, Kuwait, Saudi Arabia dan Venezuela mengadakan pertemuan di Baghdad untuk berdiskusi bagaimana cara melakukan peningkatan harga minyak mentah yang dihasilkan oleh setiap negara produsen minyak tersebut. (OPEC and Its Goals, Members, and History, t.thn.)

Pada awal pembentukannya, markas OPEC terdapat di Jenewa namun pada tahun 1996 pindah ke Wina Austria. Dari awal pembentukan OPEC tujuannya sudah mengarah untuk menjaga kestabilan minyak dunia untuk kepentingan anggota-anggotanya. (Brief History : OPEC, t.thn.)

Secara Garis besar tujuan dari OPEC adalah :

1. Menggabungkan kebijakan perminyakan atas negara-negara anggota
2. Memenuhi permintaan dunia terhadap minyak bumi
3. Melakukan penyetabilan harga minyak dunia
4. Menetapkan kebijakan-kebijakan dalam melindungi negara-negara anggota

(Brief History : OPEC, t.thn.)

Namun dalam menjalankan tugasnya OPEC tidak selalu dapat menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Karena adanya penurunan permintaan dan juga tuntutan internasional terhadap minyak di negara-negara OPEC, sedangkan OPEC tetap mengekspor

minyak dalam sumber besar mengakibatkan turunnya harga minyak contoh di Venezuela. Venezuela yang sebelumnya merupakan negara pendiri OPEC kini mengalami krisis ekonomi yang sangat parah. Harga minyak bumi yang diproduksi turun hingga 50% karena tuntutan pasar. (Ellis, 2017)

Sebagai suatu organisasi yang bertujuan mengatur ekporting minyak, OPEC mengeluarkan kebijakan untuk mengendalikan turunnya harga minyak di pasar global. Kebijakan itu diambil karena adanya pengaruh dari luar dan tuntutan pasar sehingga menyebabkan terjadinya pengambilan keputusan tersebut. Kebijakan untuk memulihkan harga minyak ini dimulai pada akhir tahun 2008. (Ratnasari, 2016). Harga minyak yang tercatat pada tahun 2008 turun hingga 100 dolar AS/barel. (Kenneth Musante, 2008)

Venezuela sebagai salah satu negara anggota OPEC memiliki letak geografi berupa, negara yang terletak di ujung utara Amerika Selatan. Ini memiliki sumber Ekonomi utama didasarkan pada produksi dan eksploitasi minyak bumi. Dari akhir 1940-an hingga 1970 negara itu adalah pengekspor minyak bumi terbesar di dunia, tetap menjadi salah satu pengekspor minyak utama ke Amerika Serikat. Ekonomi Venezuela mengandalkan pendapatan dari sektor perminyakan untuk memodernisasi dan mendiversifikasi sektor ekonomi lainnya. Pengembangan deposit kaya bijih besi, nikel, batubara, dan bauksit (bijih aluminium), serta tenaga hidroelektrik telah memperluas ekonomi.

Selama tahun 1960-an, pemerintah Venezuela menekankan kebijakan substitusi impor, menggunakan tarif protektif untuk membatasi impor barang-barang manufaktur untuk mendorong pertumbuhan manufaktur dalam negeri. Akibatnya, perusahaan yang berorientasi ekspor berkembang. Pada pertengahan 1970-an pemerintah menasionalisasi industri bijih besi, minyak, dan gas Venezuela, dan kemudian menggunakan pendapatan dari ekspor bahan bakar fosil untuk mendanai perbaikan infrastruktur utama dan pekerjaan umum lainnya. Pada akhir

abad ke-20, industri-industri Venezuela telah terdiversifikasi, dan negara itu telah mengembangkan sumber daya alam tambahan.

Venezuela negara yang pendapatan terbesar negaranya diperoleh dari minyak hingga 90% mengalami guncangan saat terjadinya penurunan harga minyak global saat tahun 2008 hingga Venezuela mengalami kerugian yang besar. Kerugian ini sangat terasa dan memuncak pada tahun 2014 di saat Venezuela sedang dalam masa transisi jabatan Presiden Hugo Chavez ke Presiden Nicholas Maduro. Kerugian terjadi hingga mengakibatkan Venezuela mengalami krisis ekonomi yang sangat besar. Banyak yang berasumsi bahwasanya krisis ini terjadi karena pemerintahan presiden Maduro sejak 2013. Namun tanda-tanda krisis ini sudah terlihat sejak Presiden Hugo masih menjabat.

Karena Krisis yang dialami oleh Venezuela pemerintah merespon dengan mencetak lebih banyak uang namun hal itu mengakibatkan melemahnya mata uang Venezuela dan terjadilah hyperinflasi. Menurut IMF hyperinflasi yang terjadi di Venezuela pada tahun 2018 yang lalu mencapai 1.000.000% hingga 1.350.000%. (Farras, 2018)

B. Rumusan Masalah

Dari keterangan latar belakang di atas, dapat dilihat bahwasanya OPEC memiliki peran terhadap pengaturan minyak dari negara anggotanya tak terkecuali Venezuela sehingga munculah rumusan masalah ““Mengapa Kebijakan Pemangkasan Kuota Produksi Minyak Anggota *Organization Of The Petroleum Exporting Countries* (OPEC) Memperparah Krisis Ekonomi Di Venezuela (2007-2018) ?”

C. Kerangka Teoritis

1. Theory Dependency

Teori ketergantungan menjadi populer pada tahun 1960-an sebagai tanggapan terhadap penelitian *Raul Prebisch*. Prebisch menemukan bahwa peningkatan kekayaan negara-negara kaya tampaknya mengorbankan negara-negara yang lebih miskin. Dalam bentuknya yang ekstrim, teori ketergantungan didasarkan pada pandangan Marxis tentang dunia, yang melihat globalisasi dalam kaitannya dengan penyebaran kapitalisme pasar, dan eksploitasi tenaga kerja murah dan sumber daya sebagai imbalan atas teknologi usang di negara maju. Pandangan dominan ahli teori ketergantungan adalah bahwa ada sistem kapitalis dunia yang dominan yang bergantung pada pembagian kerja antara negara-negara maju dan negara-negara yang miskin. Seiring waktu, negara inti akan mengeksploitasi dominasinya atas pinggiran yang semakin terpinggirkan. Teori ketergantungan menganjurkan pendekatan *berwawasan* ke dalam untuk pembangunan dan peningkatan peran negara dalam hal memberlakukan hambatan perdagangan, mempersulit investasi ke dalam dan mempromosikan nasionalisasi industri utama.¹

Teori ketergantungan dan kerabat dekatnya, teori sistem dunia, menekankan peran *hubungan eksternal* dalam proses perkembangan. Hubungan dengan negara maju dan khususnya dengan perusahaan multinasional dipandang sebagai hambatan. Pertumbuhan ekonomi dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan di luar ekonomi nasional. Teori ketergantungan berfokus pada masing-masing negara, peran mereka sebagai pemasok bahan mentah, tenaga kerja murah, dan pasar untuk barang-barang manufaktur yang mahal dari negara industri. Hubungan pertukaran yang tidak setara antara negara maju dan negara berkembang dipandang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang buruk. (Shrum, 2001)

¹ *Teori ketergantungan* (https://www.economicsonline.co.uk/Global_economics/Dependency_theory.html diambil pada 10 September 2020 pada pukul 20.00)

Dalam menjelaskan definisi ketergantungan, beberapa ahli seperti reformis liberal (Prebisch), Marxis (Andre Gunder Frank), dan ahli teori sistem dunia (Wallerstein) memiliki perbedaan yang sangat kuat. Dalam ketidaksepakatan tersebut ada beberapa inti di antara jenis dari teori ketergantungan yaitu salah untuk berfikir bahwa hanya ada satu teori yang menjelaskan ketergantungan yang bersatu. Namun terdapat pemikiran inti yang mendasari sebagian besar dari teori yang di paparkan oleh sebagian besar ahli ketergantungan. (Ferraro, 2008)

Ketergantungan dapat diartikan sebagai perkembangan perekonomian suatu negara yang berhubungan dengan pengaruh baik ekonomi, budaya, bahkan politik terhadap kebijakan pembangunan negara. Menurut Theotonio Dos Santos definisi Ketergantungan adalah Suatu kondisi yang membentuk struktur tertentu dari ekonomi dunia sedemikian rupa sehingga menguntungkan beberapa negara untuk merugikan negara lain dan membatasi kemungkinan perkembangan ekonomi subordinat

Ada tiga fitur umum untuk definisi ini yang dimiliki oleh sebagian besar ahli teori ketergantungan. Pertama, ketergantungan mencirikan sistem internasional yang terdiri dari dua kelompok negara, yang secara beragam digambarkan sebagai dominan atau bergantung, pusat atau pinggiran atau metropolitan atau satelit. Negara-negara yang dominan adalah negara-negara industri maju dalam Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Negara bagian yang bergantung adalah negara-negara Amerika Latin, Asia, dan Afrika yang memiliki GNP *per kapita* rendah dan yang sangat bergantung pada ekspor satu komoditas untuk pendapatan devisa.

Kedua, kedua definisi memiliki kesamaan asumsi bahwa kekuatan eksternal memiliki kepentingan tunggal bagi kegiatan ekonomi di dalam negara bagian yang bergantung. Kekuatan eksternal ini termasuk perusahaan multinasional, pasar komoditas

internasional, bantuan luar negeri, komunikasi, dan sarana lain apa pun yang dapat digunakan negara industri maju untuk mewakili kepentingan ekonomi mereka di luar negeri.

Ketiga, definisi ketergantungan semuanya menunjukkan bahwa hubungan antara keadaan dominan dan tergantung bersifat dinamis karena interaksi antara dua rangkaian keadaan cenderung tidak hanya memperkuat tetapi juga mengintensifkan pola yang tidak setara. Lagipula, ketergantungan adalah proses sejarah yang mengakar dalam, berakar pada internasionalisasi kapitalisme. (Ferraro, 2008)

Dalam pengaplikasiannya dalam kasus, teori ketergantungan menjelaskan tentang adanya suatu negara berkembang yang sangat bergantung baik perekonomiannya, politik dan budaya pada suatu negara maju ataupun organisasi internasional. Venezuela yang merupakan negara berkembang yang sedang mengalami keterpurukan berupa krisis ekonomi mengalami hal tersebut karena ketergantungannya terhadap harga minyak yang di atur oleh kebijakan OPEC. Harga minyak pun dapat terpengaruh karena adanya keterpurukan yang terjadi oleh negara maju yang mengakibatkan negara-negara berkembang yang pendapatan perkapitanya rendah mendapat akibat yang cukup parah.

2. International Regime Theory

Kratschwill dan Ruggie (1986) mengungkapkan bahwa definisi dari rezim adalah suatu aturan dari sebuah pemerintahan yang dibangun oleh negara-negara agar dapat

menghubungkan pikiran dan kehendak mereka serta mengatur suatu aspek internasional dari berbagai macam isu. Sehingga rezim dinilai memiliki unsur berupa elemen normatif, penyelenggaraan negara, dan peran organisasi internasional. (Andreas Hasenclever, 1997).

Stephen Krasner mengungkapkan bahwa ,

“Regime is sets of implicit or explicit principle, norms, rules, and decision-making procedures around which actors expectations converge in a given area of international relations.” “Rezim adalah serangkaian prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang tersirat atau eksplisit di mana harapan pelaku bertemu dalam bidang hubungan internasional tertentu.”

Dalam teori rezimnya, terdapat 4 hal sebagai perangkat yang dapat membentuk rezim dalam lingkungan hubungan internasional, yaitu;

- a. Prinsip adalah keyakinan akan fakta, penyebab, dan kejujuran;
- b. Norma merupakan aturan/standar berperilaku yang ada dalam hak dan kewajiban;
- c. Bentuk aturan tertentu untuk melakukan tindakan;
- d. Prosedur pembuatan kebijakan merujuk kepada praktek yang sedang berlaku (praktek umum) untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan kolektif

Teori Rezim Krasner (1983) menyebutkan bahwa rezim internasional dapat memengaruhi perilaku dari negara. Pengaruh rezim terhadap negara juga disebabkan karena rezim tersebut merupakan hasil dari keinginan-keinginan aktor-aktor itu sendiri (negara). Rezim oleh Krasner lebih menekankan kepada dimensi normatif dalam politik internasional sebagai jalan tengah antara sebuah tuntutan atau komitmen eksplisit. Jadi, Krasner menganggap rezim bukan merupakan sesuatu yang dipaksakan untuk tercipta. (Adityawarman, 2015)

Dalam pemahaman teori rezim terdapat pendekatan yang dapat membantu dalam memahami situasi di dalam skripsi ini yaitu pendekatan *interest* dalam rezim internasional. Pendekatan *interest* dalam rezim internasional

Sama halnya dengan pandangan neoliberalisme di mana pandangan tersebut mengasumsikan tentang kemampuan suatu negara untuk dapat selamat yang diwujudkan dengan cara kerja sama antarnegara. Nampaknya penerapan teori rezim dapat diartikan sebagai bentuk langkah untuk “*Survive*” baik melalui perjanjian atau pun kerja sama antarnegara dalam lingkup internasional. Sama halnya pula dengan neoliberalisme, *interest* negara di sini dilihat bertendensi kuat pada bidang ekonomi, dengan contoh berupa adanya informasi dan *transaction cost*.

Rezim juga dapat menunjukkan *interest* dari setiap negara yang menjadi anggota. Kita dapat mengklasifikasikan apa yang menjadi *interest* dari suatu negara dari rezim-rezim apa yang telah dia jalankan dan patuhi, juga posisi negara dalam rezim tersebut. Dalam sistem anarki internasional, memang tidak terpapar jelas *interest* yang dibawa oleh masing-masing negara. Neoliberalis berargumen bahwa rezim yang terbentuk dalam kerangka kerja sama merupakan media yang penting dalam menciptakan perdamaian dalam sistem internasional yang anarki. Karena, *interest* negara dapat dicapai melalui kerja sama yang erat kaitannya dengan rezim-rezim internasional. (Putri, 2014)

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa dalam teori rezim internasional pada kasus OPEC dan Venezuela rezim yang dibangun di sini adalah kebutuhan minyak di dunia sehingga terbentuklah organisasi yang mengatur tentang minyak di mana anggota-

anggotanya merupakan negara penghasil minyak bumi yang memiliki kuota yang sangat besar. Dalam pendekatan interest hal yang ingin diselamatkan adalah pada kasus krisis ekonomi Venezuela yang terjadi akibat dari permasalahan minyak dunia.

D. Hipotesa

Dari penjabaran tentang latar belakang antara Venezuela dan *Organization Of The Petroleum Exporting Countries* dan penjabaran terkait teori-teori yang dapat digunakan dalam hal krisis ekonomi yang terjadi di Venezuela. Dapat ditarik hipotesa bahwa “Mengapa Kebijakan Pemangkasan Kuota Produksi Minyak Anggota *Organization Of The Petroleum Exporting Countries* (OPEC) Memperparah Krisis Ekonomi Di Venezuela (2007-2018)? Karena

1. Pemotongan kuota produksi minyak mengakibatkan turunnya pendapatan negara Venezuela secara drastis sementara subsidi terbesar negara didapat dari hasil minyak bumi sehingga Venezuela mengalami kerugian yang sangat besar hingga mengakibatkan krisis ekonomi.

E. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *Unobtrusive Research*, di mana dalam metode tersebut terdapat 3 bidang analisa yaitu konten analisis, analisis data statistik dan analisis perbandingan sejarah. (Babbie, 2014)

2. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dan melakukan telaah studi pustaka dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, diantaranya Buku, Jurnal Majalah dan Koran, Artikel, dan sumber internet.

3. Metode Analisa

Dalam metode analisa yang akan penulis menggunakan Konten analisi dan Analisis perbandingan sejarah di mana saya akan menganalisis studi kasus yang ada Venezuela dan bersinggungan dengan OPEC.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan pada penelitian ini adalah pada batasan waktu berdasarkan permasalahan yang terjadi di Vinezuela tepatnya pada transisi pergantian rezim Hugo dan Maduro, di mana awalmulanya ketergantungan Venezuela yang berlebihan terhadap minyak bumi yang kini mengakibatkan krisis ekonomi (2007 – 2018).

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bab I :Pendahuluan yang berisi; latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, metodologi penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penelitian.
- Bab II : Membahas tentang Sejarah dan dinamika kebijakan OPEC
- Bab III :Akan membahas tentang dinamika kebijakan Venezuela pada rezim transisi Hugo Chavez dan Nicolas Maduro atas ketergantungan terhadap minyak
- Bab IV : Akan membahas tentang tekanan ganda terhadap perekonomian Venezuela berupa kebijakan OPEC dan ketegantungan hasil minyak
- Bab V : Merupakan bab yang akan membahas tentang uraian kesimpulan dari bab-bab sebelumnya